BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan pertanian
Balai Penelitian Tanah

LAPORAN KINERJA

2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penelitian Tanah (Balittanah) sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis dibawah koordinasi Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) merupakan balai nasional yang memiliki tugas fungsi terkait pengelolaan tanah dan pupuk. Tujuan utama yang ingin dicapai Balittanah telah dituangkan daam Renstra Balittanah 2020 – 2024. Tujuan tersebut adalah (1) Menyediakan teknologi dan inovasi sumberdaya lahan pertanian mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern, (2) Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Penelitian Tanah, (3) Mengelola anggaran Balai Penelitian Tanah yang akuntabel dan berkualitas.

Bertolak dari tujuan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar dalam menentukan capaian sasaran Balittanah pada tahun 2022, adalah (1) Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian, (2) Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, (3) Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan selama TA 2022 adalah: berpindahnya anggaran kegiatan penelitian seiiring dengan transformasi Balitbangtan menjadi Badan Standaridisasi Instrumen Pertanian (BSIP), berkurangnya SDM Balittanah dikarenakan beralihnya fungsional peneliti dan litkayasa ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) seiiring dengan terbitnya Perpres No. 78 Tahun 2021 dan adanya recofusing anggaran.

Berdasarkan kondisi anggaran penelitian tersebut, maka capaian output yang diperoleh menggunakan hasil capaian 4 tahun sebelumnya. Untuk menanggulangi berkurangnya SDM yang ada, maka Balittanah melakukan optimalisasi pembagian tugas yang merata. Recofusing anggaran untuk kegiatan peneltian dan manajemen menyebabkan kegiatan belanja modal tidak optimal dan kegiatan riset tidak dapat berjalan.

Balai Penelitian Tanah pada tahun 2022 mendapatkan anggaran dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) senilai Rp. 18.921.422.000-; Anggaran tersebut digunakan (1)**.** Belanja Pegawai senilai Rp. 8.506.904.000,- (2). Belanja Barang Operasional senilai Rp. 3.579.159,000,- (3). Belanja barang Non Operasional (manajemen dan Hibah Luar Negeri) senilai Rp. 6.037.859.000,- (4). belanja modal senilai Rp. 750.000.000,- dan total realisasi dana yang berhasil dibelanjakan Satker Balittanah sebesar Rp. 18.648.232.738,- (98,56%) dengan sisa anggaran atau efisiensi keuangan sebesar Rp. 273.189.262,- (1,44%),-. Dengan anggaran sejumlah itu, Balittanah telah dapat mencapai target output dengan sangat baik dan berhasil.

Pencapaian kinerja Balittanah yang optimal ini antara lain didukung oleh kondisi kerjasama yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian dalam perencanaan indikator kinerja pada tahun 2022 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran UPT Balai Penelitian Tanah dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapasitas dan pembinaan program.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I. PENDAHULUAN 1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 4
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 4
2.1.1. Visi 4
2.1.2. Misi 4
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan 4
2.1.4. Arah Kebijakan 5
2.1.5. Strategi 5
2.1.6. Program dan Kegiatan 6
2.1.7. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 10
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 10
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 12
3.2.1. Capaian Kinerja Tahun Berjalan 12
3.2.2. Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya 18
3.2.3. Keberhasilan 20
3.2.4. Kendala dan Langkah Antisipasi 21
3.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 22
3.2.6. Capaian Kinerja Lainnya 25
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 25
3.3.1. Realisasi Anggaran 26
3.3.2 PNBP 27
PENUTUP 29
DAFTAR PUSTAKA 31
LAMPIRAN 32

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Balittanah tahun 2022 8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balittanah TA.2022 8
Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Balittanah 2022 11
Tabel 4. Hasil output penelitian yang dimanfaatkan dalam 5 tahun terakhir 13
Tabel 5. Komponen dan sub komponen ZI 15
Tabel 6. Kategori Tingkat Pelaksanaan ZI 16
Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021 dan 2022 18
Tabel 8. Kendala dan Langkah Antisipasi 21
Tabel 9. Nilai efisiensi kinerja indikator kinerja utama Balittanah TA. 2022 24
Tabel 10. Realisasi Anggaran Balittanah Tahun 2022 Per Jenis Belanja 26
Tabel 11. Target dan realisasi PNBP Balai Penelitian Tanah tahun 2022. 28

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Piagam penghargaan dari KPPN Bogor TA. 2022 25
Gambar 2. Diagram Alokasi Anggaran Balittanah TA.2022 26
Gambar 3. Target dan Realisasi PNBP Balittanah TA 2010 – 2022 28

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Tim Penyusun LAKIN Balittanah Tahun 2022..... 32
Lampiran 2. Struktur Organisasi Balittanah 33
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balittanah TA.2022 34
Lampiran 4. Manual IKU 2020-2024 36
Lampiran 5. Ringkasan per Output RKA-KL Balittanah TA. 2022 39
Lampiran 6. Indikator Kinerj 1 40
Lampiran 7. Indikator Kinerj 3 56
Lampiran 8. Indikator Kinerj 4 74

BAB I
PENDAHULUAN

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah didasari oleh Peraturan Menteri Pertanian tanggal 11 Maret 2013 Nomor. 26/Permentan/OT.140/3/2013. Tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah (Balittanah) seperti yang tertera pada pasal 3 adalah: (1) pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanah; (2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah, kesuburan tanah, pupuk dan biologi tanah; (3) pelaksanaan penelitian konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah, kesuburan tanah, pupuk dan biologi tanah; (4) pelaksanaan penelitian komponen teknologi pengelolaan tanah dan pupuk; (5) pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanah; (6) penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanah; (7) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balittanah.

Pada Pasal 4 tertuang tentang susunan organisasi Balai Penelitian Tanah terdiri dari Subbag Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknik, Seksi Jasa Penelitian, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Mengacu pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional terhitung mulai tanggal 12 April 2021, pejabat yang mengelola Seksi Pelayanan Teknik, Seksi Jasa Penelitian dijabat oleh sub koordinator.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan, serta urusan rumah tangga. Sub Koordinator Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan serta pelayanan sarana penelitian. Sub Koordinator Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendaya-gunaan hasil penelitian tanah. Kelompok Jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi kepemerintahan bersifat dinamis mengikuti perkembangan di masyarakat, kebutuhan organisasi, lingkungan strategis, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 157/Kpts/OT.160/J/7/2005, maka mulai tanggal 10 Juli 2006, Balai Penelitian Tanah Bogor menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Rincian tugas dan pekerjaan eselon III di Balai

Penelitian lingkup Badan Litbang Pertanian diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No 31/Kpts/J/2/2007.

Selaras dengan tugas dan fungsi tersebut, kegiatan penelitian Balittanah 2020-2024 diarahkan untuk menghasilkan teknologi pengelolaan lahan, formula pupuk dan pembenah tanah, test kits, perangkat lunak serta isolat unggul untuk peningkatan produktivitas lahan mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern (Renstra Balittanah, 2020).

Perkembangan organisasi kepemerintahan terus berkembang secara dinamis. Hal ini pun terjadi pada struktur organisasi lingkup Kementerian Pertanian dimana pada tanggal 21 September 2022 telah terbit Peraturan Presiden No. 117/2022 tentang Kementerian Pertanian. Pada Perpres 117/2022 pasal 28 menyatakan terbentuknya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang merupakan transformasi dari Badan Litbang Pertanian. Terbentuknya BSIP ini juga diikuti oleh UK dan UPT dibawahnya termasuk Balai Penelitian Tanah. Lebih lanjut tugas fungsi penelitian, pengembangan dan kaji terap telah berlalih menjadi tugas fungsi terkait standardisasi instrument pertanian dibawah BSIP.

Balittanah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumberdaya yang memadai meliputi sumberdaya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana. Jumlah SDM lingkup Balittanah per 31 Desember 2022 sebanyak 92 orang. Berdasarkan Golongan, jumlah PNS Golongan I, II, III, dan IV masing-masing sebanyak 3, 42, 46 orang, dan 1 orang. Berdasarkan pendidikan akhir, Balittanah memiliki 3 orang lulusan doktor (S3), 10 orang master (S2), 19 orang sarjana (S1), 12 orang sarjana muda (S0/D3), 42 orang SLTA, 1 orang SLTP dan 5 orang lulusan SD.

Berdasarkan jenjang jabatan fungsional, Balittanah memiliki 0 orang peneliti utama, 0 orang peneliti madya, 4 orang peneliti muda, 5 orang peneliti pertama. Seiiring dengan transformasi balitbangtan maka fungsional peneliti Balittanah telah beralih menjadi analis standardisasi muda (4 orang), analis prasarana pertanian (5 orang) dan analis kebijakan (1 orang). Kondisi jumlah pegawai (PNS) Balittanah pada TA.2022, diperkirakan 92 orang dengan asumsi yang pensiun 5 orang dan penambahan staf baru 20 orang.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program di Balittanah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, antara lain berupa instalasi rumah kaca dan kebun percobaan lahan kering di Tamanbogo, Lampung Timur (seluas $\pm$ 20,14 ha) yang digunakan untuk penelitian dan teknik budidaya tanaman pangan lahan kering masam. Selain itu Balittanah mempunyai Laboratorium Terpadu yang terdiri atas (1) Laboratorium Kimia Tanah, (2) Laboratorium Fisika Tanah, (3) Laboratorium Biologi Tanah dan (4) Laboratorium Mineralogi.

Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik atau "*good governance*" menuntut adanya penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi maka pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat dan meningktakan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam perpres tersebut mengamanatkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut peraturan tersebut mewajibkan setiap pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung-jawaban berupa laporan disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LAKIN).

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Balai Penelitian Tanah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang merupakan lanjutan dari Renstra 2015-2019 dan telah disempurnakan mengikuti dinamika lingkungan strategis nasional maupun global, terutama dalam aspek sumberdaya lahan pertanian. Renstra Balai Penelitian Tanah telah disusun berdasarkan agenda utama untuk menjamin keberlanjutan kegiatan penelitian selama periode lima tahun. Renstra berisikan sasaran yang akan dicapai dengan indikator yang dapat diukur untuk dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan.

Penyusunan Renstra Balittanah 2020-2024 mengacu dan berpedoman pada Renstra Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rancangan Renstra Kementerian Pertanian, Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang telah dijabarkan pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian), serta Renstra Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi

"Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Mendukung Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern".

2.1.2. Misi

a. Menghasilkan teknologi dan inovasi bernilai scientific dan impact recognition mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern,
b. Mewujudkan institusi yang transparan, profesional, dan akuntabel,
c. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional, dan
d. Mengembangkan kapasitas institusi dan SDM penelitian tanah yang profesional dan berintegritas.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan utama Balai Penelitian Tanah tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Menyediakan teknologi dan inovasi sumberdaya lahan pertanian mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern,
2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Penelitian Tanah,
3. Mengelola anggaran Balai Penelitian Tanah yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai Balai Penelitian Tanah pada periode 2020-2024 adalah:

1. Termanfaatkannya teknologi dan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian.
2. Terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.
3. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

2.1.4. Arah Kebijakan

Sejalan dengan posisi kelembagaan Balai Penelitian Tanah berada di bawah Badan Litbang Pertanian, dan dikoordinasikan oleh Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, maka arah kebijakan dan strategi 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan Badan Litbang Pertanian dan Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 2020-2024, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian Tanah, yakni:

1) Memperkuat upaya pengembangan dan penyediaan teknologi pengelolaan tanah inovatif untuk meningkatkan produktivitas lahan pada berbagai tipe agroekosistem, terutama pada lahan suboptimal,
2) Mendorong kegiatan penciptaan dan pengembangan teknologi pengelolaan tanah presisi dengan memanfaatkan teknologi maju terkini (advanced technology) dalam rangka mendukung implementasi smart farming di era industri 4.0,
3) Menggali dan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya lokal, termasuk sumberdaya hayati tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan, efisiensi usahatani, dan kemajuan bioscience,
4) Meningkatkan kualitas dan jumlah terbitan karya tulis ilmiah untuk pemenuhan aturan jabatan fungsional peneliti, scientific recogniton, dan pemeliharaan predikat Balittanah sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI), dan
5) Memperkuat kinerja dan tatakelola lembaga melalui penguatan manajemen program, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen anggaran, serta sarana dan prasarana.

2.1.5. Strategi

Balai Penelitian Tanah mempunyai beberapa Strategi di berbagai bidang penelitian dan diseminasi, yaitu:

1) Memperkuat upaya identifikasi dan analisis permasalahan produktivitas lahan pada berbagai tipe agroekosistem, terutama pada lahan sub-

optimal, upaya menjaring informasi pengelolaan lahan di tingkat petani, dan upaya harmonisasi dengan kebijakan di tingkat pusat,

2) Mendorong interaksi dan kolaborasi antara berbagai lembaga riset dan praktisi yang terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan prioritas pada upaya mewujudkan teknologi yang presisi, aman, tahan lama, mudah digunakan, dan murah.
3) Mendorong upaya eksplorasi sumberdaya lokal, termasuk sumberdaya hayati tanah yang meliputi kegiatan riset inovasi dan pengembangannya.
4) Meningkatkan fasilitas riset, jumlah kerjasama penelitian skala internasional, dan menghadirkan atmosfer akademis yang nyaman untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas.
5) Memperkuat komitmen, kinerja, dan kerjasama seluruh karyawan untuk mewujudkan tatakelola lembaga yang bersih, modern, dan akuntabel melalui penguatan manajemen program, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen anggaran, serta sarana dan prasarana.
6) Dalam hal terjadi force majure, seperti terjadinya gangguan eksternal yang diakibatkan oleh wabah penyakit, termasuk Pandemi Covid19, dampak perubahan iklim global dan bencana alam yang berujung pada realokasi anggaran Pemerintah (APBN), maka Balittanah akan melakukan efisiensi berupa penundaan dan/atau pengurangan kegiatan penelitian dan manajemen, serta sepenuhnya akan mendukung kegiatan Pemerintah dan Kementerian Pertanian. Pada sisi lain Balittanah akan berupaya mencari sumber dana dari pihak non-Pemerintah (swasta dalam dan luar negeri) yang tidak mengingat guna melaksanakan kerja sama penelitian.

2.1.6. Program dan Kegiatan

Balai Penelitian Tanah telah menyusun program dan kegiatan tahun 2020-2024 yang dilakukan secara komprehensif dan berjenjang dengan mengacu pada dokumen mulai dari rencana strategis BBSDLP Tahun 2020-2024, rencana strategis Badan Litbang Kementerian Pertanian (Balitbangtan) Tahun 2020-2024, Rencana Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana Strategisi yang disusun secara berjengjang ini mengacu pada visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi Balittanah.

Program Balittanah untuk periode 2020 – 2024, secara umum memiliki tujuan yang sama dengan unit kerja lain di lingkup Balitbangtan yang disusun dengan memperhatikan haluan pembangunan nasional yaitu: i) Menyediakan teknologi dan inovasi pengelolaan tanah mendukung pembangunan pertanian nasional, ii) Mewujudkan pelayanan prima dan penyelenggaraan birokrasi yang

efektif dan efisien di lingkungan Balittanah, dan iii) Mengelola anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Lebih lanjut, sasaran program Balitbangtan periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: a) Tersedianya dan termanfaatkannya teknologi dan inovasi pengelolaan tanah mendukung pembangunan pertanian nasional, b) Terwujudnya pelayanan prima dan penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Balittanah, dan c) Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

Selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran Balitbangtan, BBSDLP selaku UK yang mengkoordinir Balittanah telah merumuskan arah dan strategi penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024 pada pengembangan inovasi sumberdaya lahan pertanian (lahan sawah, lahan kering, lahan rawa, ikim, dan air), optimalisasi lahan suboptimal (lahan kering masam, lahan kering iklim kering, lahan gambut, dan lahan terlantar bekas tambang), formulasi pupuk dan pembenah tanah (organik, anorganik, hayati, teknologi pupuk nano), kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pertanian ramah lingkungan, analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya lahan pertanian, serta pengembangan basis data dan teknologi sistem informasi pertanian berbasis web.

Fokus Kegiatan Penelitian Balai Penelitian Tanah

Fokus kegiatan Balittanah untuk tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari program yang diperluas dengan kegiatan rutin maupun insidentil sebagai implementasi dari pelaksanaan tupoksi Balittanah. Adapun kegiatan penelitian Balittanah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1) Penelitian dan pengembangan inovasi pengelolaan tanah presisi.
2) Penelitian dan pengembangan inovasi pengelolaan tanah di berbagai tipe agroekosistem untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.
3) Pelaksanaan kegiatan pertanian maju, mandiri, dan modern.

2.1.7. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peringkat akuntabilitas kinerja. Seiring dengan reorganisasi Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai dengan Peraturan Presiden no 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian, maka tugas fungsi BSIP salah satunya terkait standardisasi instrument pertanian. Hal ini berdampak terhadap perubahan capaian IKU Balittanah yang semula berupa hasil penelitian litbang sumberdaya lahan pertanian. Akibat reorganisasi

maka berdampak terhadap di blokirnya anggaran kegiata penelitian, sehingga capaian IKU TA. 2022 untuk hasil penelitian tahun berjalan menjadi tidak ada (N/A). Untuk mencapai tujuan dan sasaran Balittanah yang telah ditetapkan, telah disusun rencana aksi dan indikator kinerja utama (IKU) seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Balittanah tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1.	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 4 tahun terakhir) Persentase hasil litbang Sumberdaya dan sistem pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan Jumlah hasil litbang sumberdaya lahan pertanian pada tahun berjalan (output akhir)
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanah

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Komitmen Balai Penelitian Tanah dalam upaya mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan setelah melalui berbagai pembahasan, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Berikut ini disajikan Perjanjian Kinerja Balai Penelitian Tanah TA.2022 :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balittanah TA.2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya dan sistem pertanian yang dimanfaatkan	13 Jumlah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase hasil litbang Sumberdaya dan sistem pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	N/A
		Jumlah hasil litbang sumberdaya lahan pertanian pada tahun berjalan (output akhir)	N/A
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah	80.2 (Nilai ZI)
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanah)	86 (Nilai PMK)
	TOTAL ANGGARAN 2022	**Rp. 18.921.422.000,-**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil yang telah dicapai oleh Balittanah, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) merupakan bagian dari Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Data capaian kegiatan yang digunakan bersumber dari seluruh kegiatan yang ada di Balai Penelitian Tanah.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya monitoring dan evaluasi serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Balai Penelian Tanah-Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap triwulanan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJA (*Smartkemenkeu*), Bappenas (*e-monev* Bappenas), Balitbangtan (i-monev) dan yang dibuat oleh BBSDLP dan Balittanah sendiri (Monitoring Serapan anggaran).

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Balittanah Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit kerja.

Indikator kinerja yang berlaku harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif, serta (6) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Kriteria pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022 mengacu pada kriteria penilaian skorsing yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu (1) sangat berhasil : > 100 persen; (2) berhasil : 80 - 100 persen; (3) cukup berhasil : 60 - 79 persen; dan (4) tidak berhasil : 0 - 59 persen.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Balai Penelitian Tanah mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 4 indikator kinerja utama (IKU) dengan target dan capaian untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Balittanah 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian	Jumlah hasil litbang sumberdaya dan sistem pertanian yang dimanfaatkan (kumulatif 4 tahun terakhir)	Jumlah	13	19	146.15
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya dan system pertanian	%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah hasil litbang sumberdaya dan system pertanian pada tahun berjalan	Jumlah	N/A	N/A	N/A
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah	Nilai ZI	80.2	90.32	112.62
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanah	Nilai PMK	86	86.43	100.5%
Rata-Rata Capaian Kinerja						
Pagu Anggaran			**Rp.**	**18.921.422.000,-**		
Realisasi Anggaran			**Rp.**	**18.648.232.738,-**		**98,56**

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun Berjalan

Capaian kinerja Balittanah Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2022 Balai Penelitian Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 :	**Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian**

Indikator kinerja untuk sasaran pertama ini adalah:

Indikator Kinerja 1

Jumlah hasil penelitian Balai Penelitian Tanah yang termanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2018-2022) Balittanah menargetkan 13 jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan. Akan tetapi hingga akhir tahun 2021 diperoleh data bahwa teknologi Balai Penelitian Tanah yang telah dimanfaatkan sejumlah 19 teknologi/produk. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa target yang dipatok diawal tahun 2022 sudah mencapai target yang sudah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya dan sistem pertanian yang dimanfaatkan	13	19	146.15

Formula atau cara menghitung indikator kinerja 1 adalah :

Σ Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (t-4 hingga t)

Cara pengambilan data Indikator Kinerja 1, yaitu :

1) Hitung hasil penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan mulai dari 4 tahun sebelumnya hingga 1 tahun sebelumnya. Diseminasi dapat berupa: karya ilmiah, gelar teknologi, penyuluhan, bimbingan teknis, dan temu bisnis.
2) Hitung hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam 4 tahun terakhir.

Seluruh teknologi yang telah dimanfaatkan dihasilkan dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Balai Penelitian Tanah dengan rincian per tahun digambarkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. Hasil output penelitian yang dimanfaatkan dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Output Balittanah		
	Teknologi	Formula	Sistem Informasi
2018	1	5	0
2019	1	0	0
2020	2	0	0
2021	1	1	0
2022	6	3	0

Indikator Kinerja 2

Persentase hasil litbang Sumberdaya dan sistem pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Indikator kinerja 2 merupakan Rasio hasil penelitian Balai Penelitian Tanah pada tahun berjalan terhadap seluruh output hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden no. 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maka tugas fungsi penelitian, pengembagan dan kaji terap telah beralih ke BRIN. Hal ini berdampak terhadap pemblokiran anggaran kegiatan penelitian di Balai Penelitian Tanah. Berdasarkan kondisi ini maka indikator kinerja 2 Rasio hasil penelitian Balai Penelitian Tanah pada tahun berjalan terhadap seluruh output hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan tidak dapat dilaksanakan, karena ketiadaan anggaran.

Kondisi ini diikuti dengan terjadinya reorganisasi Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), maka tugas fungsi Penelitian, pengembangan dan kaji terap berubah menjadi tugas fungsi standardisasi instrument pertanian. Akibat reorganisasi ini, maka capaian IKU TA. 2022 untuk hasil penelitian tahun berjalan menjadi tidak ada (N/A).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio hasil penelitian Balai Penelitian Tanah pada tahun berjalan terhadap seluruh output hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan.	N/A	N/A	N/A

Formula atau cara menghitung indikator kinerja 2 adalah :

(Σ Hasil penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan / Σ Kegiatan penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan) x 100%

Cara pengambilan data Indikator Kinerja 2, yaitu :

1) Hitung hasil penelitian pada tahun berjalan yang sesuai dengan *milestone*s Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP). Hasil penelitian dapat berupa: teknologi, rekomendasi, peta, sistem informasi, database, dan formula.
2) Hitung jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan berdasarkan Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP).
3) Hitung rasio hasil penelitian pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian Balittanah yang dilakukan pada tahun berjalan

Sasaran 2 :	**Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Indikator kinerja untuk sasaran kedua ini adalah:

Indikator Kinerja 3

Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah

Balai Penelitian Tanah telah melakukan evaluasi terkait Zona Integritas di tahun 2022 dimana pembangunan ZI merupakan *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Oleh karena itu pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, dimana aturan pelaksanaannya telah tertuang pada PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil penilaian zona integritas yang telah dilakukan dilingkup Balitbangtan, Balai Penelitian Tanah memperoleh nilai zona integritas sebesar 90,36 dari 100. Nilai ZI didapatkan dengan cara mengisi lembar kerja evaluasi (LKE) secara mandiri yang kemudian dilakukan evaluasi silang di tingkat Eselon 2. Nilai zona integritas yang didapatkan oleh Balai Penelitian Tanah melebihi nilai

yang ditargetkan yaitu 80,2. Angka ini menunjukkan keberhasilan dengan kinerja **"ISTIMEWA"** dengan kategori tingkat pelaksanaan Zona Integritas AA.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah	80.2	90.32	112.62

Nilai ZI diperoleh dari penilaian terhadap dua komponen yang masing-masing komponen terdiri atas dua sub komponen. Kedua komponen dimaksud disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Komponen dan Sub Komponen ZI

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	Sub Sub Komponen
1.	Pengungkit	30%	1. Pemenuhan	1. Manajemen Perubahan (4%) 2. Penataan Tatalaksana (3,5%) 3. Penataan Sistem Manajemen SDM (5%) 4. Penguatan Akuntabilitas (5%) 5. Penguatan Pengawasan (7%) 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5%)
		30%	2. Reform	1. Manajemen Perubahan (5%) 2. Penataan Tatalaksana (3,5%) 3. Penataan Sistem Manajemen SDM (5%) 4. Penguatan Akuntabilitas (5%) 5. Penguatan Pengawasan (7%) 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5%)
2.	Hasil	40%		1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,5%) 2. Pelayanan Publik yang Prima (17,5%)

Berdasarkan tabel penilaian diatas, Balai penelitian Tanah untuk komponen pengungkit, sub komponen hasil masing-masing mendapatkan nilai secara berurutan sebagai berikut : manajemen perubahan dengan nilai 4.00, penataan tatalaksana dengan nilai 3.04, penataan sistem manajemen SDM dengan nilai 4.59, penguatan akuntabilitas dengan nilai 5.00, penguatan pengawasan dengan nilai 7.00, dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan nilai 4.53. Nilai pada sub komponen reform mendapatkan nilai secara berurutan sebagai

berikut : manajemen perubahan dengan nilai 3.67, penataan tatalaksana dengan nilai 3.33, penataan sistem manajemen SDM dengan nilai 4.25, penguatan akuntabilitas dengan nilai 5.00, penguatan pengawasan dengan nilai 7.00, dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan nilai 4.79. Sedangkan untuk komponen hasil mendapatkan nilai secara berurutan yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan nilai 19.31 dan pelayanan publik yang prima mendapatkan nilai sebesar 14.48. Secara keseluruhan, Balai Penelitian Tanah mendapatkan nilai Zona Integritas sebesar 90.32 yang termasuk kategori AA dengan predikat ISTIMEWA. Kategori dan predikat ZI dapat dilihat pada Tabel 6.

Table 6. Kategori Tingkat Pelaksanaan ZI

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 90- 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2	A	> 80 - 90	Sangat baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instantional maupun di tingkat unit kerja
3	BB	> 70 - 80	Baik	Secara instantional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4	B	> 60 - 70	Cukup baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5	CC	> 50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6	C	> 30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
				dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja
7	D	0 - 30	Sangat buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

Sasaran Kegiatan 3 :	**Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Indikator Kinerja 5

Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanah

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017. Dalam pelaksanaanya, Balai Penelitian Tanah menggunakan Aplikasi Smart DJA yang dibangun berdasarkan *system web-based* untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, komponen pengukuran dan evaluasi dalam aplikaasi Smart DJA yang terdiri dari : 1) penyerapan anggaran, 2) konsistensi, 3) Capaian Rincian Output (CRO), 4) efisiensi, 5) nilai efisiensi. Balittanah melakukan pengisian progress fisik kegiatan dalam aplikasi SMART setiap bulannya dan secara otomatis akan didapatkan nilai capaian sebagaimana tersebut diatas.

Pada akhir Desember 2022, Balai Penelitian Tanah mendapatkan nilai sebesar 86.43 yang merupakan rata rata nilai dari komponen yaitu: 1) nilai penyerapan anggaran sebesar 98.45, 2) nilai konsistensi sebesar 98.77, 3) nilai CRO sebesar 100, 4) Efisiensi sebesar 1.55, dan 5) nilai efisiensi sebesar 53.86.

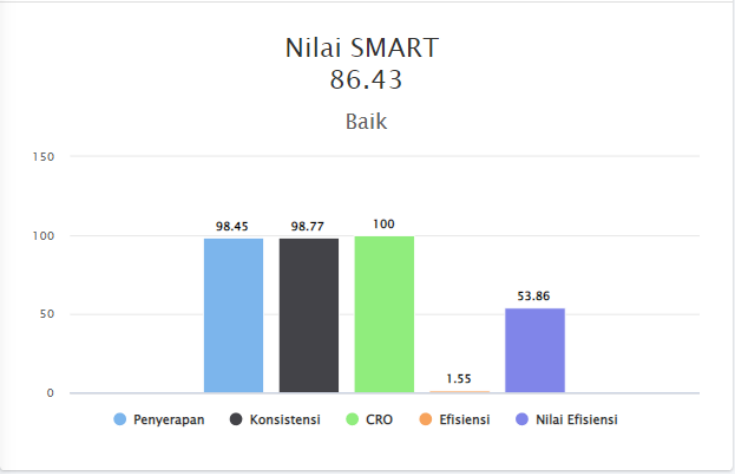

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanah	86,00	86,43	100,5

3.2.2. Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari implementasi Renstra 2020-2024, dimana ketercapaian target harus diperhatikan agar target Renstra pada tahun 2022 dapat tercapai. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1.	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumberdaya dan Sistem Pertanian	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya dan sistem pertanian yang dimanfaatkan	Jumlah	16	19

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022
		Persentase hasil litbang Sumberdaya dan sistem pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan.	%	100	N/A
		IKK Peneliti (Pemakalah, KTI nasional/internasional)	Jumlah	88	-
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah	Nilai ZI	80.36	90.32
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanah	Nilai PMK	88	86.43

Perbandingan capaian output pada sasaran 1 indikator kinerja jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya dan sistem pertanian yang dimanfaatkan terdapat perbedaan peningkatan pada tahun 2021 berjumlah 16 dan tahun 2022 berjumlah 19. Terdapat perubahan indikator kinerja 2 yaitu Persentase

hasil litbang Sumberdaya dan sistem pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan tahun 2021 dan 2022, dimana pada tahun 2022 untuk output yang dihasilkan N/A dikarenakan tugas fungsi penelitian, pengembangan dan kaji terap seluruh telah beralih ke lembaga BRIN sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Kondisi diikuti dengan pemblokiran anggaran kegiatan penelitian di Balai Penelitian Tanah. Sehingga seluruh output hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran 2 indikator Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana nilai ZI pada tahun 2021 sebesar 80,36 dan meningkat menjadi sebesar 90,32 pada tahun 2022. Peningkatan Nilai ZI merubah predikat penialian yang diperoleh Balai Penelitian Tanah yang sebelumya predikat A (sangat baik) menjadi predikat AA (istimewa).

Sasaran 3 pada indikator Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas mengalami penurunan dari 88,00 (2021) menjadi 86,43 (2022). Penurunan nilai PMK disebabkan adanya anggaran yang diblokir untuk kegiatan Automatic adjustment yang berdampak pada realisasi anggaran dan pencapaian output. Pada tahun 2022 telah terjadi pemblokiran anggaran diantaranya pemblokiran pada kegiatan penelitian dan diseminasi dan kegiatan manajemen seperti belanja modal dalam kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas penunjang laboratorium, dengan keterangan blokir *automatic adjustment.*

3.2.3 Keberhasilan

Pada tahun 2022 telah terjadi perubahan bentuk perjanjian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya yang mencakup indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Dokumen Perjanjian kinerja (PK) Balittanah memiliki 3 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian, 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan 3) Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang matang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap tim yang akan melaksanakan kegiatan. Pemilihan dan penetapan Ketua Tim beserta anggotanya merupakan langkah awal kunci keberhasilan suatu kegiatan. Ketua Tim dan anggota Tim yang ditunjuk didasarkan atas kompetensinya terhadap kegiatan tertentu. Setelah dilakukan penetapan Ketua Tim beserta anggotanya, kunci sukses selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana. Setiap tim yang akan melakukan tugas diberikan kewenangan untuk menyusun kebutuhan peralatan dan bahan untuk kegiatan

yang akan dilakukan. Selanjutnya setiap Tim yang telah terbentuk melakukan berbagai tahapan persiapan hingga pelaksanaaan terkait kegiatan yang dilaksanakan. Secara umum capaian kinerja indikator kinerja sasaran lingkup Balai Penelitian Tanah tahun 2022 menunjukkan tingkat keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

Pelaksanaan kegiatan di TA 2022 juga menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala yang terjadi diantaranya keterbatasan SDM berkeahlian khusus, adanya refocussing anggaran dan blokir anggaran yang terjadi, masa transisi tugas dan fungsi Balittanah seiring dengan terbentuknya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang merupakan reorganisasi dari Balitbangtan.

3.2.4 Kendala dan Langkah Antisipasi

Guna pencapaian target output Balai Penelitian Tanah telah mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi berdasarkan jenis sasaran target. Disamping itu telah di tetapkan juga langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan kegagalan dalam pencapaian target output. Adapun kendala dan langkah-langkah yang dilakukan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kendala dan Langkah Antisipasi

No.	Sasaran	Kendala		Langkah Antisipasi	
		Fisik	Non Fisik	Fisik	Non Fisik
1	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumberdaya dan Sistem Pertanian	Beragamnya kebutuhan terkait Pemanfaatan teknologi informasi serta keterbatasan SDM	Informasi terkait kebutuhan akan Teknologi dan Inovasi Sumberdaya dan Sistem Pertanian	Mengoptimalkan kinerja SDM dengan Pembagian tugas yang merata	Mencari informasi terkait kebutuhan akan Teknologi dan Inovasi Sumberdaya dan Sistem Pertanian
		Pemotongan anggaran kegiatan	Output tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang direncakan	Mengoptimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia	Melakukan pengurangan atau penghematan biaya bahan, upah, dan perjalanan

No.	Sasaran	Kendala		Langkah Antisipasi	
		Fisik	Non Fisik	Fisik	Non Fisik
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Belum adanya SDM khusus arsiparis	Belum optimalnya sistem penyimpanan dokumen	Mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk pengarsipan dokumen dan pendukung lainya	Mengoptimalkan sistem penyimpanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Terblokirnya anggaran kegiatan	Optimalisasi kegiatan	Melakukan revisi anggaran

3.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Nilai efisiensi kinerja merupakan salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam PMK No. 214 Tahun 2017. Nilai efisiensi merupakan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja

anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Pengukuran nilai efisiensi memerlukan data-data sebagai berikut: data capaian keluaran (*output*) kegiatan, data capaian, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (*output*) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (*output*) kegiatan. Efisiensi mempunyai skala -20% sampai dengan 20%, sehingga perlu ditranformasi skala efisiensi yang berkisar antara 0 sampai dengan 100%. Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya (PMK 214/2017, pasal 8 ayat 9).

Transformasi skala efisiensi menjadi kisaran antara 0 sampai dengan 100% digunakan rumus di bawah ini :

$$NE = 50\ \% + \left[\frac{E}{20} \times 50 \right]$$

Keterangan :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Nilai efisiensi kinerja dari setiap indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja (PK) Balittanah yang menggunakan anggaran pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 9. Nilai efisiensi indikator kinerja Balittanah mencapai angka 106,2%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran di Balittanah.

Tabel 9. Nilai efisiensi kinerja indikator kinerja utama Balittanah TA. 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)			Output			Harga satuan (Rp)	Harga total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai efisiensi (NE) (%)	Nilai efisiensi (NE) (%)
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
Jumlah hasil penelitian Balittanah yang dimanfaatkan (4 tahun sebelumnya)	Jumlah	4,213,533,000	4,169,681,695	98.96	13	19	146.15	324,117,923	6,158,240,538	32.29	1.31	130.73
Rasio hasil penelitian Balittanah pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian Balittanah yang dilakukan pada tahun berjalan	Persen	-	-		N/A	-	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya Birokrasi Balai Penelitian Tanah yang Efektif dan Efisien	Nilai ZI	4,840,139,000	4,826,144,541	99.71	80.2	90.32	112.62	60,350,860	5,450,889,707	11.46	0.79	78.65
Terkelolanya Anggaran Balai Penelitian Tanah yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai PMK									1.5	0.54	53.75
Total		9,053,672,000	8,995,826,236	99.36			86.26		11,609,130,245.19	22.51	1.06	106.28

3.2.6 Capaian Kinerja Lainnya

Balai Penelitian Tanah sebagai salah satu UPT di bawah Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian telah memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bogor atas pencapaian kinerja pelaksaan anggaran semester 1 tahun 2022 satker lingkup KPPN Bogor. Penghargaan ini diperoleh untuk kategori penyampaian SPM gaji tepat waktu dan benar.

Gambar 1. Piagam penghargaan dari KPPN Bogor TA. 2022

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Balai Penelitian Tanah pada umumnya berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Biaya operasional seluruh kegiatan Balai Penelitian Tanah pada tahun 2022 berdasarkan total pagu terakhir adalah sebesar Rp. 18.921.422.000,- dengan rincian per Belanja: Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.506.904.000,-; Belanja Operasional Rp. 3.579.159.000,-; Belanja Non Operasional Rp. 6.037.859.000,-; dan Belanja Modal Rp. 797.500.000,-. Keseluruhan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Balai Penelitian Tanah.

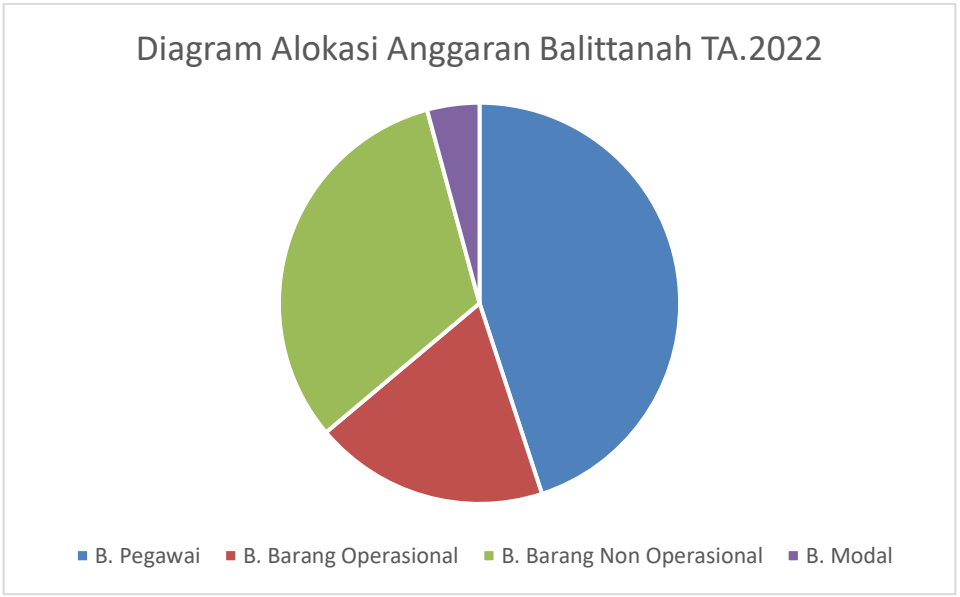

Gambar 2. Diagram Alokasi Anggaran Balittanah TA.2022

Berdasarkan Gambar. 2 terlihat bahwa proporsi belanja pegawai menempati proporsi terbesar yakni 44,96%, selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh belanja barang non operasional menempati proporsi kedua sebesar 31.91%, belanja barang operasional menempati proporsi ketiga sebesar 18,92%, dan belanja modal menempati proporsi terkecil yakni 4,21% dari total pagu anggaran.

3.3.1. Realisasi Anggaran

Total realisasi anggaran yang berhasil diserap Balai Penelitian Tanah pada TA 2022 sebesar Rp. 18.648.232.738,- atau 98,56% dari Total Pagu Anggaran Balittanah Tahun 2022 sebesar Rp. 17.676.202.000,-. Seluruh kegiatan dapat terselesaikan dengan lancar dan baik memenuhi target realisasi fisik maupun realisasi keuangan. Realisasi anggaran Balai Penelitian Tanah per jenis belanja untuk tahun 2022 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Balittanah Tahun 2022 Per Jenis Belanja

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	8.506.904.000	8.261.413.807	97,11

2	Belanja Operasional	3.579.159.000	3.566.335.470	99,64
3	Belanja Non Operasional	6.037.859.000	6.023.040.191	99,76
4	Belanja Modal	797.500.000	796.675.650	99,89
5	**Total**	**18.921.422.000**	**18.648.232.738**	**98,56**

3.3.2. PNBP

Balai Penelitian Tanah, selain mendapatkan dana dari APBN dan Hibah, juga menerima pendapatan dari PNBP yang bersumber dari jenis penerimaan umum dan fungsional diantaranya dalam bentuk layanan laboratorium tanah. Laboratorium tanah telah terakreditasi dan mendapatkan sertifikat ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) dengan nomor Akreditasi LP-846-IDN yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024. Sebanyak 215 parameter yang tersertifikat dalam akreditasi LP-846-IDN.

Target Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Penelitian Tanah pada tahun 2022 mencapai Rp. 3.550.000.000,- yang terdiri dari Target Penerimaan Umum sebesar Rp. 0,- dan Target Penerimaan Fungsional sebesar Rp. 3.550.000.000.

Selanjutnya, realisasi penerimaan PNBP Balai Penelitian Tanah sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp. 3.571.916.336,- sehingga diperoleh presentase nilai realisasi penerimaan PNBP Balittanah pada tahun 2022 sebesar 100,62%, angka tersebut sudah melebihi dari target penerimaan PNBP yang ditargetkan. Rincian target dan realisasi PNBP di Balai Penelitian Tanah untuk tahun 2022 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Target dan realisasi PNBP Balai Penelitian Tanah tahun 2022

Uraian	Target PNBP TA.2022 (Rp.)	Realisasi PNBP TA.2022 (Rp.)
Fungsional	3.550.000.000	3.568.797.410
Umum	0	3.118.926

Jumlah	**3.550.000.000**	**3.571.916.336**
Prosentase Realisasi Target PNBP	**100.62%**	

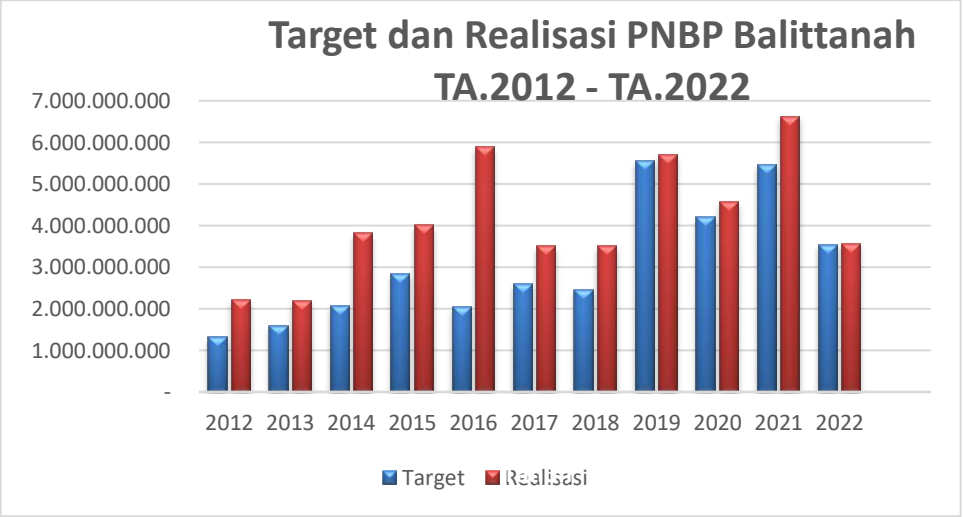

Gambar 3. Target dan Realisasi PNBP Balittanah TA 2012 - 2022

IV. PENUTUP

Guna mewujudkan penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja maka Balai Penelitian Tanah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Balittanah. Hasil penerapan SAKIP dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan wujud pertanggungjawaban Balittanah kepada publik.

Penilaian Laporan Kinerja tahun 2022 tidak berbeda jauh dengan tahun 2021, di mana hasil kegiatan tidak hanya mengacu pada *output* (keluaran), tetapi berdasarkan *outcome* (dampak, manfaat jangka menengah dan panjang). Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2022 terdiri dari tiga sasaran kegiatan dan empat Indikator Kinerja. Adapun target capaian pada tahun 2022 berupa jumlah hasil penelitian Balittanah yang dimanfaatkan (akumulasi 4 tahun terakhir) hingga akhir tahun 2022 dengan target 13 judul dan telah terelaisasi sebanyak 19 judul dengan persentase capaian 146.15%.

Capaian berikutnya berupa rasio hasil penelitian Balittanah pada tahun berjalan terhadap kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan. Hasil yang diperoleh untuk capaian ini adalah N/A. hal ini dikarenakan tugas fungsi penelitian, pengembagan dan kaji terap telah beralih ke BRIN dan diikuti dengan pemblokiran anggaran kegiatan penelitian dan diseminasi.

Target capaian berikutnya adalah nilai ZI dimana pada tahun 2022 Balai Penelitian Tanah memperoleh nilai ZI sebesar 90,32 atau 112,62% lebih tinggi dari target sebesar 80,2. Capaian berupa output maupun outcome akan lebih bernilai bila diukur dengan nilai realisasi anggaran dan efisiensinya. Persentase realisasi anggaran di tahun 2022 adalah sebesar 98,56%. Angka efisensi indikator kinerja Balittanah mencapai 22,51 dengan nilai efisiensi rata-rata 106,28%.

Keberhasilan pencapaian sasaran secara umum didukung oleh sumberdaya yang handal, terutama SDM Balai Penelitian Tanah yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Selain iitu peran serta sarana dan prasarana yang memadai juga berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan ditahun 2022 ini juga mengalami beberpa permasalahan dan hambatan diantaranya keterbatasan SDM dan refocussing anggaran. Untuk menanggulangi hambatan tersebut maka telah dilakukan mengoptimalkan kinerja SDM dengan Pembagian tugas yang merata, mengoptimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia dan mengajukan revisi anggaran.

Keberhasilan kinerja Balai Penelitian Tanah tidak lepas dari komitmen pimpinan yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Peningkatan kualitas kinerja dilakukan dengan pembinaan etos kerja terhadap seluruh jajaran Balittanah, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen.

Capaian kinerja sasaran berbasis output menjadi evaluasi yang sangat berharga bagi Balittanah, sehingga untuk terus meningkatkan kinerja outcome oriented dilakukan berbagai upaya. Adapun upaya yang diterapkan adalah :

1) Perencanaan yang matang dan sistematis setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target IKU dan menyesuaikan dengan renstra ataupun program strategis Kementerian Pertanian, flagship Kementerian dan Balitbangtan
2) Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran pengguna,
3) Penetapan skala prioritas kegiatan yang mengacu pada prioritas nasional dan komoditas utama pendukung pencapaian Lumbung Pangan Dunia 2045,
4) Perlu perencanaan kegiatan yang matang dengan mekanisme yang terkontrol dan tervalidasi melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan,
5) Pemberian "*reward dan punishment"* dilakukan secara proporsional kepada setiap penanggung jawab kegiatan berdasarkan penggunaan anggaran dan tingkat capaian kinerjanya, dan
6) Melakukan terobosan baru penyusunan program kerja/anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis IT agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

V. DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang Pertanian. 2005. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No.: 157/Kpts/OT.160/J/7/2005, Tanggal 10 Juli 2006, Balai Penelitian Tanah Bogor menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan Litbang Pertanian. 2007. Rincian tugas dan pekerjaan eselon IV di Balai Penelitian/BPTP lingkup Badan Litbang Pertanian diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No 31/Kpts/J/2/2007.

Badan Litbang Pertanian. 2010. Renstra Badan Litbang Pertanian tahun 2010-2014

Badan Litbang Pertanian. 2020. Panduan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.

Balittanah. 2021. Renstra Balai Penelitian Tanah tahun 2020-2024. Update terakhir 2021

LAN. 2003. Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Perpu 39/2006. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Peraturan Menteri Pertanian No.: 26/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah.

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian.

PK Tahun 2020. Balai Penelitian Tanah. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Renstra Balittanah Tahun 2020 – 2024. Balai Penelitian Tanah. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

UU 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolosi, dan nepotisme.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tim Penyusun LAKIN Balai Penelitian Tanah Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati M.Sc.	Ka. Balittanah	Penanggung Jawab
2.	Dr. Adha Fatmah S., M.Sc	Sub Koord. Yantek	Ketua
3.	Hery Supiyono, S.E	Staf Yantek	Sekretaris
4.	Komarudin	Staf Yantek	Anggota
5.	Teguh Pribadi Wijaya, SP	Staf Yantek	Anggota
6.	Nurhayati, S.Hut	Staf yantek	Anggota

Lampiran 2. Struktur Organisasi Balai Penelitian Tanah

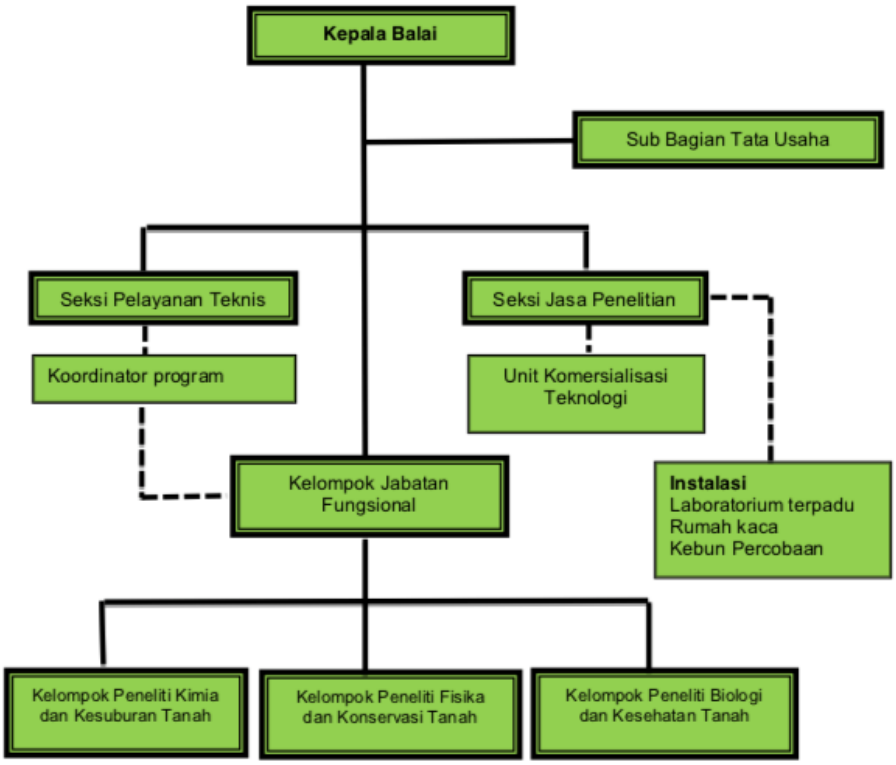

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balai Penelitian Tanah TA. 2022

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAH
Jl. Tentara Pelajar No. 12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16114
Telepon : (0251) 8336757, Fax : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE :http://balittanah.litbang.pertanian.go.id E-mail :balittanah@litbang.pertanian.go.id, balittanah.ipri@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ladiyani Retno Widowati
Jabatan : Kepala Balai Penelitian Tanah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2021

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Ladiyani Retno Widowati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENELITIAN TANAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian	1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya dan sistem pertanian yang dimanfaatkan	13 Jumlah
		2. Persentase hasil litbang Sumberdaya dan sistem pertanian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	90%
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah	80.2 (Nilai ZI)
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanah	86 (Nilai PMK)

KEGIATAN
Balai Penelitian Tanah

ANGGARAN
Rp. 24.547.565.000

Jakarta, 13 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Balai Penelitian Tanah

Ladiyani Retno Widowati

Lampiran 4. Manual IKU 2020-2024

BALANCED SCORECARD LEVEL 3 (BALAI PENELITIAN TANAH)

1. SASARAN KEGIATAN (SK) DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
2. PETUNJUK *CASCADING* UNTUK IKSK (*KPI TREE*)
3. MANUAL IKSK

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2020 - 2024

MANUAL INDIKATOR	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian yang termanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Tenologi yang telah didiseminasikan
Formula/ cara menghitung	Σ Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (t-5 hingga t)
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Penelitian Tanah
Cara pengambilan data	Berdasarkan Teknologi Balai Penelitian Tanah yang dimanfaatkan 5 tahun terakhir
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/sumber IKSP	Balai Penelitian Tanah

MANUAL INDIKATOR	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pemanfatan Teknologi dan Inovasi Sumber Daya dan Sistem Pertanian
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Rasio hasil penelitian Balai Penelitian Tanah pada tahun berjalan terhadap seluruh output hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Catatan capaian output
Formula/ cara menghitung	
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Penelitian Tanah
Cara pengambilan data	$\frac{\sum output\ akhir\ hasil\ penelitian\ dan\ pengembangan SDLP}{\sum Total\ ouput\ hasil\ penelitian\ dan\ pengembangan\ SDLP\ (output\ akhir + output\ antara)}$
Catatan khusus	Penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dengan multiyear sehingga sebelum dihasilkan output utama akan dihasilkan output antara setiap tahunnya dengan peta jalan yang telah ditentukan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/sumber IKSP	Balai Penelitian Tanah

MANUAL INDIKATOR	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penelitian Tanah (Nilai)
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Nilai Hasil Evaluasi ZI
Formula/ cara menghitung	Mengacu kepada PermenPan RB yang berlaku PermenPan RB no 10 tahuun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK/WBM di lingkup instansi pemerintah
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Cara pengambilan data	Menggunanakan LKE
Catatan khusus	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian membentuk Tim untuk mengevaluasi nilai ZI UK dan UPT
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/sumber IKSP	Tim evaluasi ZI Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Tim Evaluasi yang lebih berwenang (Itjen atau MenpanRB)

MANUAL INDIKATOR	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Balai Penelitian Tanah yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Nilai Kinerja Balai Penelitian Tanah (berdasarkan PMK yang berlaku) (Nilai)
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK Nomor 214 tahun 2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga Screenshoot Nilai Kinerja dari Aplikasi SMART DJA
Formula/ cara menghitung	Nilai Kinerja dihitung *By System* melalui aplikasi SMART DJA
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Aplikasi SMART DJA untuk Eselon 1
Cara pengambilan data	- Login ke dalam aplikasi SMART DJA, dengan Balai Penelitian Tanah - Masuk ke dashboard aplikasi untuk melihat Nilai Kinerja Balai Penelitian Tanah
Catatan khusus	Nilai Kinerja pada tahun berjalan (tahun t) masih terus terupdate sampai bulai februari t+1
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/sumber IKSP	Pelanan teknis Balai Penelitian Tanah

Lampiran 5. Ringkasan per Output RKA-KL Balittanah TA. 2022

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp. 000,-)	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp. 000,-)	Selisih (Rp. 000,-)
DIPA AWAL				**24.547.565**	**DIPA AKHIR**				**18.921.422**	**- 5.626.143**
018.09.KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**			**1.141.390**	**018.09.KB**	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**			**0**	**-1.141.390**
4584	**Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem**			**1.141.390**	**4584**	**Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem**			**0**	**-1.141.390**
4584.SDA.512	Teknologi Pertanian	2	Produk	641.390	4584.SDA.512	Teknologi Pertanian	0	Produk	0	
4584.SDA.515	Diseminasi Teknologi Pertanian	2	Produk	500.000	4584.SDA.515	Diseminasi Teknologi Pertanian	0	Produk	0	
018.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**			**23.406.175**	**018.09.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**18.921.422**	**- 4.484.753**
1809	**Dukungan Manajemen, Fasilitasi Dan Instrumen Teknis**			**23.406.175**	**1809**	**Dukungan Manajemen, Fasilitasi Dan Instrumen Teknis**			**18.921.422**	**- 4.484.753**
					1809.AEA.503	Layanan Kerjasama	1	Keg	1.245.220	1.245.220
					1809.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Lay	439.334	439.334
1809.EBA.962	Layanan Umum	1	Lay	179.500	1809.EBA.962	Layanan Umum	1	Lay	674.230	494.730
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Lay	13.319.100	1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Lay	12.086.063	- 1.233.037
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	58	Unit	6.423.500	1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	4	Unit	750.000	- 5.673.500
1809.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	110	Orang	350.000	1809.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	110	Orang	340.000	- 10.000
1809.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dok	270.000	1809.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dok	542.000	272.000
1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dok	79.500	1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dok	79.500	0
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dok	2.784.575	1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dok	2.765.075	- 19.500

Lampiran 6. Indikator Kinerja 1

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018													
1	Biobus	2007	Konsorsia mikroba tanah unggul untuk meningkatkan produktivitas kedelai	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018)	Bimtek World Soil Day 5 Des 2018	Konsorsia mikroba tanah unggul untuk meningkatkan produktivitas kedelai	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018)		Lampiran 1 dan 2 Penerimaan Royalti BPATK 2007-2018
2	M-Dec	2007	Inokulan perombak bahan organik	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK)	Bimtek World Soil Day 5 Des 2018	Inokulan perombak bahan organik	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK)		Lampiran 1 dan 2 Penerimaan Royalti BPATK 2007-2018
3	Nodulin	2007	Inokulan bintil akar plus untuk kacang-kacangan	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK)	Bimtek World Soil Day 5 Des 2018	Inokulan bintil akar plus untuk kacang-kacangan	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK)		Lampiran 1 dan 2 Penerimaan Royalti BPATK 2007-2018
4	Bio Nutrien	2007	Inokulan penyubur tanah dan penyedia hara untuk tanaman pangan, hortiukultura	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK)	Bimtek World Soil Day 5 Des 2018	Inokulan penyubur tanah dan penyedia hara untuk tanaman pangan, hortiukultura dan perkebunan	2018		2018 : Pelaku pertanian (data royalty BPATK)		Lampiran 1 dan 2 Penerimaan Royalti BPATK 2007-2018

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan perkebunan										
5	SMART	2018	Pupuk hayati yang diformulasikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018)	Bimtek World Soil Day 5 Des 2018	Pupuk hayati yang diformulasikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi	2018		Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018)		Lampiran 1 dan 2 Penerimaan Royalti BPATK 2007-2018
6	Teknologi rehabilitasi	2018	Paket teknologi rehabilitasi lahan bekas tambang batu bara	2018	Bangka Belitung	Pemda Prov. Bangka Belitung	Temu lapang	Paket teknologi rehabilitasi lahan bekas tambang batu bara	2018	Bangka Belitung	Pemda Prov. Bangka Belitung		
2019													
7	Teknologi pengelolaan lahan kering masam	2018	Paket teknologi pengelolaan lahan kering masam	2019	Lampung	Petani, penyuluh dan peneliti	Temu lapang dan panen raya jagung di Lampung	Paket teknologi pengelolaan lahan kering masam	2019	Lampung	Petani, penyuluh dan peneliti	Temu lapang dan panen raya jagung di Lampung	Lampiran 3 Dokumentasi pemanfaatan teknologi
2021													

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Biodekomposer Dekolign	2021	Dekomposer yang mengandung konsorsia fungi *Phanerochaeta* sp. dan *Pyrenochaeta* sp untuk mendekomposisi bahan organik yang mengandung lignin rendah hingga lignin tinggi seperti ranting-ranting	2021	Labangka, Sumbawa	Pelaku pertanian	Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa	Dekomposer yang mengandung konsorsia fungi *Phanerochaeta* sp. dan *Pyrenochaeta* sp untuk mendekomposisi bahan organik yang mengandung lignin rendah hingga lignin tinggi seperti ranting-ranting	2021	Labangka, Sumbawa	Pelaku pertanian	Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa	Lampiran 4 Dokumentasi pemanfaatan Biodekomposer Dekolign
9	Teknologi pembuatan MOL	2015	Paket teknologi pembuatan MOL	2019, 2021	Balittanah, Labangka-Sumbawa	Petani, penyuluh, Mahasiswa, peneliti, swasta	Bimtek dalam rangka World Soil Day 3-4 Des 2019, Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa. Masyarakat dibeali	Paket teknologi pembuatan MOL	2019, 2021	Balittanah, Labangka-Sumbawa	Petani, penyuluh, Mahasiswa, peneliti, swasta	Bimtek dalam rangka World Soil Day 3-4 Des 2019, Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa. Masyarakat dibeali pembuatan MOL jika	Lampiran 5 Dokumentasi pemanfaatan teknologi

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							pembuatan MOL jika tidak ada dekompoer yg bisa diperoleh					tidak ada dekompoer yg bisa diperoleh	
10	Teknologi konservasi tanah dan air	2015	Paket teknologi konservasi tanah dan air	2019 2021	Lampung, Banjarnegara	Petani, penyuluh dan peneliti	Temu lapang dan panen raya jagung di Lampung, penelitian RPIK Banjarnegara dengan komoditas tanaman kentang	Paket teknologi konservasi tanah dan air	2020 2021	Humbahas Sumut, Banjarnegara	Petani, penyuluh, pemda, dinas pertanian, peneliti, Kementan	Dalam rangka pelaksanaan program Food Estate di Humbahas, penelitian RPIK Banjarnegara dengan komoditas tanaman kentang	Lampiran 9 Dokumentasi pemanfaatan teknologi
11	Teknologi Jagung Provitas Tinggi pada Lahan Kering Masam	2018	Paket Teknologi Jagung Provitas Tinggi pada Lahan Kering Masam	13 Februari 2020	Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , Penyuluh dan POPT, Kades, gapoktan beserta petani	Temu Tani pengembangan jagung provitas tinggi dengan kombinasi teknik budidaya dan Teknologi	Paket Teknologi Jagung Provitas Tinggi pada Lahan Kering Masam	13 Februari 2020, 2021	Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , Penyuluh dan POPT, Kades, gapoktan beserta petani	Temu Tani pengembangan jagung provitas tinggi dengan kombinasi teknik budidaya dan Teknologi Rekapitulasi Fosfat Alam	Lampiran 7 Dokumentasi pemanfaatan teknologi

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Rekapitulasi Fosfat Alam						
2022													
12	PUTK, PUTS, PUP, PUTR, PUPO	2008-2015	Perangkat uji tanah kering, sawah, rawa, dan uji pupuk	2018 2020 2021 2022	Balittanah, Sumbawa, Situbondo, Lampung, Ngawi, Pekalongan, Cianjur, Bogor	Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018), petani, penyuluh (2020), Penyuluh, petani (2022)	Bimtek World Soil Day 5 Des 2018, Bimtek Pengelolaan Kesuburan Tanah Maret 2020, Kegiatan penelitian, bimbingan teknis, atau pengiriman bahan diseminasi	Perangkat uji tanah kering, sawah, rawa, dan uji pupuk	2020 2021 2022	Sumbawa, Situbondo, Lampung, Ngawi, Pekalongan, Cianjur, Bogor	Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018), petani, penyuluh, dinas pertanian (2020), Penyuluh, petani (2022)	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesuburan Lahan BPPSDMP Maret 2020, Kegiatan penelitian, bimbingan teknis, atau pengiriman bahan diseminasi	Lampiran Dokumentasi bimbingan teknis

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Agrodeko	2021	Dekomposer yang mengandung tericiderma koningii, T. Harzianum, T. Hamatum Gam4, T. viride Trv13, serta Candida sp Y.BN.3	2021 2022	Labangka, Sumbawa	Pelaku pertanian	Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa	Dekomposer yang mengandung tericiderma koningii, T. Harzianum, T. Hamatum Gam4, T. viride Trv13, serta Candida sp Y.BN.3	2021 2022	Labangka, Sumbawa	Pelaku pertanian	Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa	Lampiran 6 Dokumentasi pemanfaatan Agrodeko
14	Agrimeth	2015	Pupuk hayatiuntuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	2018, 2019, 2020, 2021	Balittanah, Indramayu, Kalimantan Tengah, Labangka-Sumbawa	Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018)	Bimtek UPSUS, Bimbingan teknis di lokasi demfarm Food Estate, Untuk pengayaan mikroba pada Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa	Pupuk hayatiuntuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	2018, 2019, 2020, 2021	Balittanah, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Kalimantan Tengah, Labangka-Sumbawa	Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018), petani, penyuluh, dinas pertanian (2019, 2020, 2021)	Bimtek dilokasi demfarm Food Estate Kalimantan Tengah 10-12 Okt 2020 dan 19-21 Nov 2020, Untuk pengayaan mikroba pada Pembuatan kompos pada RPIK sapi-jagung Sumbawa	Lampiran 7 Dokumentasi bimbingan teknis

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jeranti	2012	Pupuk majemuk lengkap untuk jeruk dan tanaman buah lainnya	2018 2022		Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018)	Bimtek World Soil Day 5 Des 2018	Pupuk majemuk lengkap untuk jeruk dan tanaman buah lainnya	2018 2022		Pelaku pertanian (data royalty BPATK 2018)		Lampiran 1 dan 2 Penerimaan Royalti BPATK 2007-2018
15	Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman Padi, Jagung Dan Kedelai Pada Lahan Sawah (Per Kecamatan)	2021	Buku rekomendasi pemupukan tanaman padi, jagung, dan kedelai untuk lahan sawah perkecamatan di Indonesia	2021 2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Buku rekomendasi pemupukan tanaman padi, jagung, dan kedelai untuk lahan sawah perkecamatan di Indonesia	2021 2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Lampiran 8 Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman Padi, Jagung Dan Kedelai Pada Lahan Sawah (Per Kecamatan)
16	Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman Perkebunan (Per kabupaten)	2022	Buku rekomendasi pemupukan tanaman perkebunan perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Buku rekomendasi pemupukan tanaman perkebunan perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Lampiran 8 Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman Perkebunan (Per kabupaten)

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman pakan ternak (Per kabupaten)	2022	Buku rekomendasi pemupukan tanaman pakan ternak perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Buku rekomendasi pemupukan tanaman pakan ternak perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Lampiran 8 Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman pakan ternak (Per kabupaten)
18	Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman hortikultura (Per kabupaten)	2022	Buku rekomendasi pemupukan tanaman hortikultura perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Buku rekomendasi pemupukan tanaman hortikultura perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Lampiran 8 Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman hortikultura (Per kabupaten)

NO	DIHASILKAN		DIDISEMINASIKAN					DIMANFAATKAN					EVIDENCE
	OUTPUT	TAHUN	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	STAKE HOLDER TERKAIT	KET	OUTPUT	WAKTU	TEMPAT	PENERIMA MANFAAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman ubi kayu (Per kabupaten)	2022	Buku rekomendasi pemupukan tanaman ubi kayu perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Buku rekomendasi pemupukan tanaman ubi kayu perkabupaten di Indonesia	2022	Dikidim ke seluruh dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Dinas pertanian provinsi se Indonesia dan Direktorat jenderal teknis terkait	Buku untuk menjadi acuan pembuatan e-RDKK bagi penyuluh dan acuan distribusi pupuk subsidi pemerintah	Lampiran 8 Buku Dosis Pupuk N, P, K Untuk Tanaman ubi kayu (Per kabupaten)

Matrik Perolehan Apresiasi Nasional atau Internasional Reference atas Kinerja Balai Penelitian Tanah TA. 2019

No.	Nama Apresiasi - Penghargaan	Deskripsi Singkat	Keterangan - Informasi lainnya
1	dana royalti produk Jeranti	dana royalti diperoleh dari hasil penjualan produk balittanah yang sudah dilensi oleh perusahaan/mitra	Produsen PT Pupuk Kujang, 2019
2	mendapatkan dana royalti produk Agrimeth	dana royalti diperoleh dari hasil penmjualan produk balittanah yang sudah dilensi oleh perusahaan/mitra	Produsen PT AIM, 2019
3	Perangkat Uji Pupuk Anorganik	Mengukur kadar hara NPK dalam pupuk anorganik	Royalti Rp. 1.045.500,-
4	Perangkat Uji Pupuk Organik	Mengukur kadar hara pH, C, N,P, K Fe pada pupuk organik	Royalti Rp. 2.648.800,-
5	Perangkat Uji Tanah Sawah	Mengukur kadar hara N, P, K, pH yang terkandung di tanah sawah	Royalti Rp. 4.090.200,-
6	Perangkat Uji Tanah Kering	Mengukur pH, K, P, C organik dalam tanah kering	Royalti Rp.2.140.725,-
7	Perangkat Uji Tanah rawa	Mengukur kadar hara pH, NPK di lahan rawa	Royalti Rp. 1.761.200,-
8	Agrimeth	Pupuk hayati untuk tanaman padi	Royalti Rp. 2.856.740,-
9	B-Fert	Pupuk Hayati	Royalti Rp. 4.590.000,-
10	M-Dec	Pupuk perombak pembuatan kompos (dekomposer)	Royalti Rp. 1.865.740,-
11	Jeranti	Pupuk Majemuk	Royalti Rp. 57.464.505,-

Pemanfaatan Teknologi Pengelolaan Lahan Karing Masam di KP Tamanbogo dan Margototo Lampung

(A)

(B)

(C)

(D)

(A) KP. Tamanbogo, Lampung. (B) KP. Tamanbogo, Lampung (12 Juli 2019). (C) Margototo Lampung (6 Feb 2019). (D) Margototo, Lampung.

Pembuatan kompos dengan menggunakan Biodekomposer Dekolign di Labangka, Sumbawa

Peneliti Balittanah memperkenalkan teknologi pengomposan menggunakan MOL di PT. Great Giant Pineaple Lampung tgl 7 September 2019

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Agrimeth di Lokasi FE Kalimantan Tengah 2020

Buku Reomendasi pemupukan yang digunakan untuk penyusunan ERDKK

Dokumentasi Kegiatan Penerapan Teknologi Konservasi Tanah dan Air di FE Humbang Hasundutan Penerapan teknologi konservasi tanah dan air. Perbandingan kondisi saluran buntu antara sebelum musim hujan (Gambar kanan) dan setetah periode 1,5 bulan kejadian hujan (Gambar kiri) di lokasi food estate hortikultuta, di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut Tahun 2020.

Penerapan teknologi konservasi tanah dan pemupukan di kegiatan RPIK Kentang di Banjarnegra, Jawa Tengah tahun 2021.

Bimtek pembuatan Mol di Labangka, Sumbawa 2021

Gambar sebelah kiri Pelatihan PUTK di Labangka, Sumbawa, gambar sebelah kanan Praktik penggunaan PUTK situbondo

Dokumentasi Kegiatan Pemanfaatan PUTS, PUTK, PUP, dan PUTR dalam rangka Bimtek Pengelolaan Kesuburan Tanah BPPSDM 2020

Gambar sebelah kiri Penyerahan PUTK dan PUTS ke dinas pertanian Way Kanan, gambar sebelah kanan Penyerahan teskit (PUTK, PUTS, PUP, dan PUPO) ke kelompok tani di Majalengka.

Dokumentasi Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Jagung Provitas Tinggi pada Lahan Kering Masam di Margototo Lampung Tahun 2020

Dokumentasi Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Jagung Provitas Tinggi pada Lahan Kering Masam di Margototo Lampung Tahun 2021

Lampiran 7. Indikator Kinerja 3

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

Penilaian	Penjelasan	Pilihan Jawaban		Jenis Evidence	Nilai	Catatan/Keterangan/Penjelasan	*Evidence yang harus dilengkapi*
A. PENGUNGKIT					**56,71**		
I. PEMENUHAN					**28,16**		
1. MANAJEMEN PERUBAHAN					**4,00**		
i. Penyusunan Tim Kerja					**0,50**		
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. SK ZI TA. 2021 2. SK ZI TA. 2022 3. SK Agen Perubahan TA. 2021 4. SK Agen Perubahan TA. 2022 5. SK UPG TA. 2021 6. SK UPG TA. 2022 7. SK Tim Satlak PI TA. 2021 8. SK Tim Satlak PI TA. 2022 9. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2021 10.SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2022
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A/B/C	A	Dokumen	1,00	Daftar hadir tidak ada	1. Mekanisme penetapan Tim Zona Integritas Tahun 2021 2. Mekanisme penetapan Tim Zona Integritas Tahun 2022 3. SOP Penetapan Tim ZI Tahun 2021 4. SOP Penetapan Tim ZI Tahun 2022 5. Nota Dinas Kepala Satker Tahun 2021 tentang pengusulan nama Tim Pembangunan ZI 6. Nota Dinas Kepala Satker Tahun 2022 tentang pengusulan nama Tim Pembangunan ZI 7. Usulan nama Tim Pembangunan ZI Tahun 2021 (nota dinas Kabag TU, Koordinator PE, dan Koordinator KSPHP) 8. Usulan nama Tim Pembangunan ZI Tahun 2022 (nota dinas kabag TU, Kabid PE, Kabid KSPHP, Ka Kelti BM, Ka Kelti) 9. SK Pembangunan ZI tahun 2021 10. SK Pembangunan ZI tahun 2022
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas					**1,00**		
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00	Lengkap	1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2021 2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2022
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	A/B/C	A	Dokumen	1,00	Lengkap	1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2021 2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2022 3. PK Tahun 2021 dan 2022 4. Laporan realisasi keuangan 2021 dan 2022
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* secara berkala b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan	A/B/C	A	Dokumen	1,00	1. Screenshot Medsos WBK tidak dicantumkan 2. Header PPID WBK tidak ditampilkan	
iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM					**1,00**		

				a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2021 2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2022 3. Laporan Hasil Monev Pembangunan ZI tahun 2021 4. Laporan Sementara Monev Pembangunan ZI tahun 2022
				b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	a. Jika monitoring dan evaluasi **melibatkan pimpinan** dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		1. Laporan Hasil Monev Pembangunan ZI tahun 2021 2. Laporan Semantara Monev Pembangunan ZI tahun 2022 3. Dokumentasi apel senin
				c.	Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring danevaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		
		iv.	**Perubahan pola pikir dan budaya kerja**							**1,50**		
				a.	Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	Ya/Tidak	Ya	Kuesioner	1,00		1. Absensi Kepala Satker tahun 2021 2. Absensi Kepala Satker tahun 2022 3. SPT Kepala Satker Tahun 2021 4. Tanda Terima LHKPN Kepala Satker tahun 2021 5. Tanda Terima LHKPN Kepala Satker tahun 2022 6. Arahan Apel senin pagi tahun 2021 dan 2022 7. Himbauan Kepala Satker pada berbagai kegiatan
				b.	Sudah ditetapkan agen perubahan	a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	A/B/C	A	Wawancara	1,00		1. SK Agen Perubahan Tahun 2021 2. SK Agen Perubahan Tahun 2022 3. Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2021 4. Rencana kerja Agen Perubahan Tahun 2022 5. google drive
				c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	A/B/C	A	Kuesioner	1,00		1. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir melalui upacara senin 2. Kode etik pegawai 3. Arahan. Banner Budaya Malu dan banner pelayanan lainnya 4. Surat edaran upacara nasional 5. Surat edaran upacara tanggal 17 6.Baner kode Etik Pegawai 7. Maklumat pelayanan
				d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	A/B/C/D	A	Wawancara	1,00	Hanya tercantum list lhkasn, tapi tidak ada LHKPN	1. Notulen rapat Pembangunan ZI 2 pakta integritas pegawai 3. Indeks Kepuasan Masyarakat TA. 2021 dan TA. 2022 4. Bukti kirim LHKPN dan LHKASN 5. Surat himbauan pelaporan penerimaan gratifikasi 6. Laporan penerimaan gratifikasi TA. 2021 dan TA. 2022 7. Banner Anti Gratifikasi
	2.	**PENATAAN TATALAKSANA**								**3,04**		
		i.	**Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama**							**0,92**		

				a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		
				b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	B	Wawancara	0,75		
				c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah dievaluasi	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		
			ii.	**Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**						**1,75**		
				a.	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (*e-performance* /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (*e-performance* /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (*e-performance* /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi	A/B/C	A	Dokumen	1,00		
				b.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM	A/B/C	B	Kuesioner	0,50		
				c.	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik	A/B/C	A	Dokumen	1,00	No Wa Call center	
				d.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	A/B/C	A	Dokumen	1,00	tidak tercantum SPPD online dan dashboard monitoring	
			iii.	**Keterbukaan Informasi Publik**						**0,38**		

				a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik	A/B/C	A	Kuesioner	1,00		1 Keterbukaan informasi publik tahun 2021 dan 2022 2. SK PPID Tahun 2021 dan 2022 3. Screenshoot LAKIN Pada Website 4. Screenshoot Laporan Tahunan Pada Website
				b.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	A/B/C	B	Dokumen	0,50	1. ss database dokumen ppid, bisa ditambahkan berita penandatangan komitmen keterbukaan informasi publik 2. laporan ikm per semester	1. Lap bulanan PPID 2021 2. Lap Bulanan PPID 2022
	3.	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**								**4,59**		
		i.	**Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi**							**0,25**		
				a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. Anjab Fungsional Umum Tahun 2021 2. Anjab Fungsional Khusus Tahun 2021 3. ABK Fungsional Umum Tahun 2022 4. ABK Fungsional khusus tahun 2022
				b	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		1. Peta Jabatan Tahun 2021 2. SK CPNS Tahun 2021 3. Usulan formasi CPNS Tahun 2021
				c.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00	hnya surat pernyataan dan matriks pegawai	1. Dokumentasi rapat pleno penyuluh tahun 2021 dan 2022 2. Monitoring tugas belajar tahun 2021 dan 2022 3. Notulen rapat fungsional penyuluh pertanian tahun 2021 dan 2022 4. Undangan rapat monitoring tugas belajar tahun 2021 5. SK Tim pelaksana kegiatan pembinaan SDM Tahun 2021 dan 2022
		ii.	**Pola Mutasi Internal**							**0,50**		
				a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. Daftar mutasi pejabat tahun 2022 2. SK struktural tahun 2021 dan 2022
				b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan	a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		1. Daftar susunan pengembangan karir tahun 2021 dan
				c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. Laporan perkembangan kompetensi SDM Tahun 2021 2. SK Tim pelaksana kegiatan pembinaan SDM Tahun 2021 dan 2022

		iii.	**Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi**					**1,01**			
			a.	Unit Kerja melakukan *Training Need Analysis* Untuk pengembangan kompetensi	Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1.Laporan perkembangan kompetensi SDM tahun 2021 2. Surat Tugas Diklat Bendahara 3. DUK pegawai tahun 2021 dan 2022 4. Sertifikat prajabatan tahun 2021 dan 2022 5. Surat tugas bimbingan CPNS Tahun 2021 6. Surat tugas diklat CPNS Tahun 2021 dan Tahun 2022
			b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A/B/C/D	B	Dokumen	0,67		1. Dokumentasi uji kompetensi penyuluh tahun 2021 dan 2022 3. SKP Tahun 2021 7. Sertifikat prajabatan tahun 2021 dan 2022 8. Surat tugas bimbingan CPNS Tahun 2021
			c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75% -100%	A/B/C/D	B	Dokumen	0,67		1. Evaluasi kompetensi pegawai Tahun 2022 2.Sertfikat bendahara Tahun 2022 3. DUK pegawai tahun 2021 dan 2022
			d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	A/B/C/D	A	Kuesioner	1,00		1. SOP Diklat Fungsional 2. Surat tugas Diklat penyuluh 2021 3. Surat tugas Diklat CPNS 2021 dan 2022 4. Surat tugas prajabatan 2021 dan 2022
			e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *in-house training*, coaching, atau mentoring)	a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	A/B/C/D	A	Kuesioner	1,00		1. Undangan diklat bendahara penerimaan tahun 2022 2. Surat tugas Diklat penyuluh 2021 3. Surat tugas Diklat CPNS 2021 dan 2022 4. Surat bimbingan CPNS 2021 5. Surat tugas prajabatan 2021 dan 2022 6. Surat undangan uji kompetensi fungsional perencana
			f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan	A/B/C	B	Dokumen	0,50		
		iv.	**Penetapan Kinerja Individu**					**1,84**			

				a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		1. SKP tahun 2021 2. PK awal dan PK Revisi Tahun 2021 dan 2022
				b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan *logic model* b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	A/B/C/D	B	Dokumen	0,67		1. SKP tahun 2021 2. PK awal dan PK Revisi Tahun 2021 dan 2022
				c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		1. Absensi pegawai tahun 2021 dan 2022 2. Laporan capaian bulanan Kabag TU tahun 2021 dan 2022 3. SKP Tahun 2021
				d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian *reward*	Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian *reward* (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Ya/Tidak	Ya	Kuesioner	1,00		
			v.	**Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai**						**0,75**		
				a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan	A/B/C/D	A	Wawancara	1,00		1. Foto kode etik dan budaya kerja ASN berakhlak 2. SK hukuman disiplin tahun 2021 3.SK kode etik dan budaya kerja tahun 2021 dan 2022 4. Arahan , nota dinas KaBB apel senin tahun 2021 dan 2022 5. Rekap absen pegawai tahun 2021 dan 2022 6. Tukin tahun 2021 dan 2022
			vi.	**Sistem Informasi Kepegawaian**						**0,25**		
				a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat	A/B/C	A	Dokumen	1,00		1.Screen shot Aplikasi SIM ASN
	4.	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**								**5,00**		
		i.	**Keterlibatan Pimpinan**							**2,50**		
				a.	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	A/B/C	A	Kuesioner	1,00		1. Proposal tahun 2021 dan 2022 2. Rapat Renstra 2021 3. Rakor 2021 dan 2022 4. Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2021 dan 2022 5. Kelkutan sertaan Rapat Renstra BSIP Tahun 2022

				b.	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A/B/C	A	Kuesioner	1,00	daftar hadir ?	1. PK BBP2TP awal dan revisi tahun 2021 dan 2022 2. Dokumentasi penyusunan PK Tahun 2021 dan 2022
				c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam	A/B/C/D	A	Kuesioner	1,00	lengkap	1. Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2021 dan 2022 2. LAKIN BBP2TP tahun 2021
			ii.	**Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja**						**2,50**			
				a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00	Lakin?	1. Renstra 2020-2024_Revisi 2. DIPA Tahun 2021 dan 2022 (awal dan revisi) 3. RKAKL Tahun 2021 dan 2022 (awal dan revisi)
				b.	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00	Lakin?	1. Renstra 2020-2024_Revisi 2. DIPA Tahun 2021 dan 2022 (awal dan revisi) 3. RKAKL Tahun 2021 dan 2022 (awal dan revisi)
				c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama	ya, jika unit kerja memiliki IKU	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. RENSTRA 2020-2024_Revisi 1
				d.	Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria	a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		1. RENSTRA BBP2TP 2020-2024_Revisi 1
				e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. SK Tim TPKO BBP2TP Tahun 2021 dan 2022
				f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan	A/B/C	A	Dokumen	1,00		
				g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. SK TPKO 2021 2. SK TPKO 2022
				h	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	A/B/C	A	Wawancara	1,00		1. SK Tim TPKO 2021 DAN 2022 2. SK Tim Monev 2021 DAN 2022 3. SK Tim Program 2021 DAN TA 2022
	5.	**PENGUATAN PENGAWASAN**								**7,00**			
		i.	**Pengendalian Gratifikasi**							**1,50**			
				a.	Telah dilakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi	a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	Dokumen	1,00		1. Banner anti gratifikasi 2. SK UPG tahun 2021 dan 2022 3. Laporan UPG Tahun 2021 dan 2022 4. Web anti korupsi
				b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telahmenjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		1. Laporan UPG Tahun 2021 dan 2022
		ii.	**Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**							**1,50**			
				a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		1. SK Tim Satlak PI tahun 2021 dan 2022 2. Program Kerja Satlak PI 2021 dan 2022 3. Sosialisasi Register Risiko Tahun 2021 4. Mengikuti sosialisasi MRI lingkup Balitbangtan tahun 2022

				b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		1. Register Risiko tahun 2021 dan 2022
				c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko	A/B/C	A	Dokumen	1,00	laporan SPI 2021 ?	1. Register Risiko tahun 2021 dan 2022
				d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	A	Kuesioner	1,00		1. Sosialisasi register risiko tahun 2021 2. Laporan SPI tahun 2021 dan 2022
		iii.	**Pengaduan Masyarakat**							**1,50**		
				a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan	A/B/C	A	Wawancara	1,00		1. Laporan bulanan dumas tahun 2021 dan 2022 2. Prosedur pelayanan publik tahun 2021 dan 2022
				b.	pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		1. Laporan Pengaduan Masyarakat Bulanan Tahun 2021 dan 2022 2. Analisa data IKM TA. 2021 dan TA. 2022
				c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	Dokumen	1,00	2021 ?	Laporan Bulanan Dumas tahun 2021 dan 2022
				d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A/B/C	A	Dokumen	1,00		Laporan Bulanan Dumas tahun 2021 dan 2022
		iv.	***Whistle-Blowing System***							**1,00**		
				a.	*Whistle Blowing System* telah diterapkan	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan *Whistle Blowing System* sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan *Whistle Blowing System* yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan *Whistle Blowing System* sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan *Whistle*	A/B/C	A	Wawancara	1,00		
				b.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*	a. Jika penerapan *Whistle Blowing System* dimonitoring dan evaluasi secara berkala	A/B/C	B	Dokumen	0,50	laporan wbs 2022 ?	1. SK PPK dan PPSPM Tahun 2021 dan 2022 2. SK Benturan Kepentingan Tahun 2021 dan 2022
				c.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* telah ditindaklanjuti	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* telah ditindaklanjuti oleh unit kerja	A/B/C	B	Dokumen	0,50	tidak tecantum di evidence	1. Notulen Sosialisasi ISO TAHUN 2021
		v.	**Penanganan Benturan Kepentingan**							**1,50**		Identifikasi Benturan Kepentingan

				a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		
				b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00	Lengkap Laporan akhir th 2021, Daftar hadir/absensi tidak tercantum ? Untuk laporan th 2022 ?	1. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2021 dan 2022 2.Identifikasi Benturan Kepentingan
				c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan	A/B/C/D	A	Wawancara	1,00		.Identifikasi Benturan Kepentingan
				d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja	A/B/C	A	Dokumen	1,00	hanya ada laporan monev 2022 laporan monev 2021 ?	.Identifikasi Benturan Kepentingan
				e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja	A/B/C	A	Dokumen	1,00	hanya ada laporan monev 2022 laporan monev 2021 ?	Identifikasi benturan kepentingan
		6.	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**							**4,53**		Identifikasi benturan kepentingan
			i.	**Standar Pelayanan**						**1,00**		
				a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		

				b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		
				c.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00	Review Thn 2022	website BBP2TP
				d.	telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00	hanya ada screenshoot maklumat layanan di website	
			ii.	**Budaya Pelayanan Prima**						**0,95**		website BBP2TP
				a.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00	notulen rapat th 2021, tidak tercantum notulen rapat th 2022	
				b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	B	Dokumen	0,67		

				c.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		
				d.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		1. Hasil Survei IKM Tahun 2021 dan 2022 2. Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dan 2022
				e.	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	Observasi	1,00		Dokumen usulan perbaikan layanan : - surat pengajuan usulan ralat - tindak lanjut - hasil tindak lanjut
				f.	Terdapat inovasi pelayanan	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	A/B/C/D/E	A	Wawancara	1,00	lengkap, aplikasi lingkup kementan tapi tidak teridentifikasi milik satker yg bersangkutan	1. Screen shot IKM di website tahun 2021 dan 2022 3. Screen shot sosialisasi hasil IKM di Facebook
			iii.	**Pengelolaan Pengaduan**						**0,58**			1. Hasil Survei IKM tahun 2021 dan 2022 BBP2TP
				a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	B	Dokumen	0,75	hanya berupa link aplikasi lapor	

				b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C	B	Dokumen	0,50	tidak ada evidence	
				c.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	B	Dokumen	0,50	tidak ada evidence	
			iv.	**Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan**						**1,00**			
				a.	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		
				b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	Dokumen	1,00	link menuju aplikasi IKM Kementan, tapi tidak menampilkan hasil IKM Satker	1. Hasil survei IKM Semester I tahun 2021 2. Hasil survei IKM Semester II tahun 2021 3. Hasil survei IKM Semester I tahun 2022
				c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00	tindak lanjut SKM 2021, 2022 belum ada	1. Screen shot IKM di website tahun 2021 dan 2022 3. Screen shot sosialisasi hasil ikm di Facebook
			v.	**Pemanfaatan Teknologi Informasi**						**1,00**			
				a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	Observasi	1,00	tidak ditampilkan screenshot WA, bukti via email dalam melakukan pelayanan	
				c.	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya/Tidak	Ya	Dokumen	1,00		
				b.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	Wawancara	1,00	laporan thn 2022, tidak ada untuk 2021	
	II.	**REFORM**								**28,55**			
		1.	**MANAJEMEN PERUBAHAN**							**3,67**			
			i.	**Komitmen dalam perubahan**						**2,00**			
				a.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)	Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan	%	100,00%	Dokumen	1,00	laporan 2021	
					- Jumlah Agen Perubahan		Jumlah	10				
					- Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	11				
				b.	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		%	100,00%	Dokumen	1,00	laporan 2021	Screenshoot google drive dokumen RB Rencana Agen Perubahan 2022

					- Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	11				
					- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen		Jumlah	11				
			ii.	Kc	**Komitmen Pimpinan**					**1,00**		
					- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	Kuesioner	1,00	lengkap, tidak ada untuk Pk 2022	
			iii.	Me	**Membangun Budaya Kerja**					**0,67**		
					- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi	A/B/C/D	B	Kuesioner	0,67	lengkap, tapi tidak terdapat untuk th 2022	
		2.	**PENATAAN TATALAKSANA**							**3,33**		
			i.		**Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan**					**0,50**		
					- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%)	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		
			ii.		**Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi**					**1,00**		
				a	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	Observasi	1,00		
				b	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	Observasi	1,00		
			iii.		**Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat**					**1,83**		

				a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		
				b.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		
				c.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	B	Dokumen	0,75	hanya terdapat evidence Screenshot Web dan SILPO	
		3.	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**							**4,25**		
			i.	**Kinerja Individu**						**1,50**		

				a	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya	a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (*outcome*)	A/B/C	A	Dokumen	1,00		
			ii.		***Assessment* Pegawai**					**0,75**		
				a	Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	a. Seluruh hasil *assessment* dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil *assessment* belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil *assessment* belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	Kuesioner	0,50	matrik kebutuhan pegawai 2021 dan 2022 sama persis	
			iii.		**Pelanggaran Disiplin Pegawai**					**2,00**		
				a	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100,00%	Dokumen	1,00	hanya berupa surat pernyataan Kepala Balai th 2021 tapi tidak terdapat rinciannya	1. SK Hukuman Disiplin 2. BAP
					- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya		Jumlah	0				
					- Jumlah pelanggaran tahun ini		Jumlah	0				
					- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman		Jumlah	0				
		4.	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**							**5,00**		
			i.		**Meningkatnya capaian kinerja unit kerja**					**2,00**		
				-	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang	%	100,00%	Dokumen	1,00		Lakin Tahun 2021
					- Jumlah Sasaran Kinerja		Jumlah	3				
					- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih		Jumlah	3				
			ii.		**Pemberian *Reward and Punishment***					**1,50**		
				-	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian *reward and punishment* b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian *reward and punishment* c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian *reward and punishment* d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi	A/B/C/D	A	Kuesioner	1,00		
			iii.		**Kerangka Logis Kinerja**					**1,50**		
				-	Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?	a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00		
		5.	**PENGUATAN PENGAWASAN**							**7,50**		
			i.		**Mekanisme Pengendalian**					**2,50**		

				-	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	A/B/C/D/E	A	Dokumen	1,00		
			ii.	**Penanganan Pengaduan Masyarakat**			**%**			**3,00**		1. SK Tim 2021
				-	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan	%	100,00%	Dokumen	1,00		
					- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		Jumlah	10				
					- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		Jumlah	0				
					- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		Jumlah	10				
			iii.	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan**			**%**			**2,00**		
			i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)					Dokumen	1,00		
				-	Persentase penyampaian LHKPN	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	%	100,00%		1,00	hanya berupa evidence bukti lapor, tetapi tidak tercantum harta kekayaan yg dilaporkan - tanda terima kepala BBSDLP tercantum th 2020	LHKPN
				-	Jumlah yang harus melaporkan		Jumlah	5,00				LHKPN
					- Kepala satuan kerja		Jumlah	1,00				
					- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan		Jumlah	4,00				
					- Lainnya		Jumlah	0,00				
				-	Jumlah yang sudah melaporkan		Jumlah	5,00				
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)						1,00		
				-	Persentase penyampaian LHKASN	Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	100,00%	Dokumen	1,00		
				-	Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)		Jumlah	108,00				
					- Pejabat administrator (eselon III)		Jumlah	1,00				
					- Pejabat Penawas (eselon IV)		Jumlah	1,00				
					- Jumlah Fungsional dan Pelaksana		Jumlah	106,00				
				-	Jumlah yang sudah melaporkan		Jumlah	108,00				
		6.	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**							**4,79**		
			i.	**Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik**						**2,29**		

				a.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/*Web* 7. Perilaku Pelaksana/*Web* 8. Kualitas Sarana dan prasarana	a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	Observasi	1,00	lengkap, bisa ditambahkan standar pelayanan	
				b.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi	Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	83,33%	Observasi	0,83	1. kaitan antara laporan pengaduan dg aplikasi SPAN Lapor! 2. bentuk media spt apa laporan pengaduan masyarakat	
					- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar		Jumlah	6				
					- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah		Jumlah	5				
				ii.	**Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi**					**2,50**		
				-	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon	A/B/C/D	A	Dokumen	1,00	tidak terdapat screenshot pengaduan via email, WA dan website	
TOT										**56,71**		
B.	**HASIL**									**33,61**		
	I.	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**								**19,13**		
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)			Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	Nilai (0-4)	**3,23**		14,13		
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja S			a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil	A/B/C/D/E	A		5,00		Index Persepsi Korupsi KPK
	II.	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**								**14,48**		
		a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)			Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	Nilai (0-4)	**3,31**		14,48	tidak tercantum IKM smster 1 2022 periode jan - Juni 2022	
			TOTAL HASIL							**33,61**		
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS										**90,32**		

Kepala Balai Penelitian Tanah

Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc
NIP. 196710071994032009

Perwakilan BBP2TP

Ir. Ari Murtiningsih
19671005199803200 2

Tim Asesor/Penilai

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Ir. Yusuf, M.Si
19671027200312100 0

2. Koordinator Program dan Evaluasi

Laila Kadar, SE, M.Si
19711161994032001

3. Koordinator Kerja Sama dan

Rima Purnamayani, SP, M.Si
19760613200312200 1

3. Sub Koordinator Evaluasi

Ir. Ari Murtiningsih
19671005199803200 2

Lampiran 8. Indikator Kinerja 4

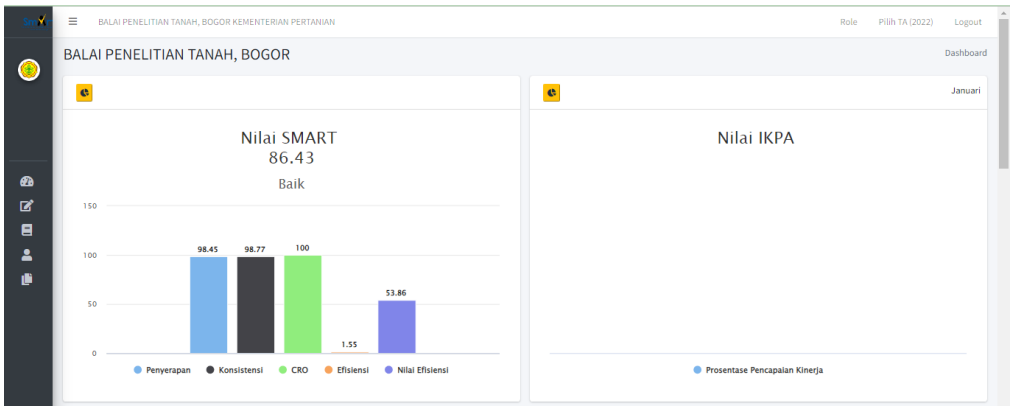

Nilai PMK Balai Penelitian Tanah berdasarkan Aplikasi Smart Kemenkeu